



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**  
P-ISSN : 2621-0312  
E-ISSN : 2657-1560  
Vol. 5, No. 2 Tahun 2022  
DOI : 10.21043/politea.v5i2.15154

---

## **Transaksionalisme Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Maroko-Israel**

Muhammad Ilham  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia  
m.ilham.isip19@mail.umy.ac.id

Arie Kusuma Paksi  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia  
ariekusumapaksi@umy.ac.id

### ***Abstract***

*In 2020, Morocco became the fourth Arab state that normalized ties with Israel in that year. The normalization deal is brokered by the US under Trump administration. This article aims to explain the reason behind Morocco's decision to normalized ties with Israel. This article utilizes conceptual framework of transactionalism as the tool of analysis with qualitative-explanative research methods. The findings of this article indicate that Morocco was willing to normalize ties with Israel in exchange for US recognition of Morocco sovereignty over Western Sahara. Moreover, the US was giving additional incentives in the form of financial investment and military equipment sale. The US recognition of Morocco sovereignty over Western Sahara is problematic because it is contrary to the UN resolution. However, US success in brokering the normalization deal has improved Trump's image. The Moroccan government also managed to gain popularity due to recognition over Western Sahara.*

*Keywords: normalization, Morocco, Israel, the US, transactionalism, Western Sahara*

## **Abstract**

Pada tahun 2020, Maroko menjadi negara Arab keempat yang menormalisasi hubungan dengan Israel di tahun itu. Kesepakatan normalisasi kedua negara disponsori oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang alasan keputusan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel. Artikel menggunakan kerangka konsep transaksionalisme sebagai alat analisis dengan metode penelitian kualitatif-eksplanatif. Hasil temuan artikel ini menunjukkan bahwa Maroko berkenan menormalisasi hubungan dengan Israel karena mendapatkan insentif berupa pengakuan kedaulatannya atas wilayah Sahara Barat oleh AS. AS juga memberikan insentif tambahan berupa investasi finansial dan penjualan peralatan militer modern. Pengakuan kedaulatan Maroko di Sahara Barat oleh AS bermasalah karena bertentangan dengan ketetapan PBB. Walaupun begitu, keberhasilan pemerintah AS dalam menormalisasi hubungan meningkatkan citra Trump. Pemerintah Maroko juga popularitasnya meningkat karena memperoleh pengakuan kedaulatan atas Sahara Barat.

Kata kunci: normalisasi, Maroko, Israel, AS, transaksionalisme, Sahara Barat

## **Pendahuluan**

Pada tahun 2020, terjadi fenomena besar dalam sejarah perpolitikan Timur Tengah dan dunia Islam. Rangkaian normalisasi hubungan dengan Israel dilakukan oleh empat negara dengan populasi mayoritas muslim di kawasan Timur Tengah. Keempat negara tersebut adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Fenomena tersebut menjadi kejutan bagi dunia Islam. Hal ini tidak terlepas dari pandangan antagonis negara-negara dunia Islam dan Arab terhadap Israel selama puluhan tahun pasca pendirian negara Israel dan rentetan perang antara negara-negara Arab dengan Israel setelahnya (Ulrichsen, 2016).

Normalisasi yang mendorong terjalinnya hubungan diplomatik antar negara menjadi tanda hubungan baik yang dijalin kedua negara tersebut dan momen dimulainya serangkaian kerja sama bilateral. Hubungan diplomatik antara negara dunia Islam dan anggota Liga Arab dengan Israel dimulai pada tahun 1979 oleh Mesir melalui penandatanganan Perjanjian Camp David setahun sebelumnya (Carter, 2021). Kemudian pada Oktober 1994, Yordania menyusul untuk menjadi negara Liga Arab kedua yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel (Riedel, 2019). Setelah hiatus panjang selama 26 tahun dalam normalisasi hubungan dunia Arab dengan Israel, pada 13 Agustus 2020 Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara Liga Arab ketiga yang melakukan normalisasi

hubungan dengan Israel. Langkah UEA diikuti oleh Bahrain pada 11 September 2020 (Holland et. al., 2020). Berikutnya pada 23 Oktober 2020, Sudan mengikuti UEA dan Bahrain untuk menormalisasi hubungan dengan Israel (Singer, 2021). Pada 10 Desember 2020, Maroko dan Israel sepakat untuk menormalisasi hubungan di antara kedua negara. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bersama dengan Israel dan AS, Maroko menjadi negara dunia Islam dan anggota Liga Arab keenam yang menormalisasi hubungan dengan Israel (Eichensehr, 2021).

Kesepakatan normalisasi antara dunia Islam dengan Israel merupakan hasil tidak terlepas dari peran sentral Amerika Serikat yang berperan menjadi mediator dan sponsor utama. AS kemudian ikut menandatangani dokumen *Joint Declaration* yang menjadi dokumen formal normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel pada tanggal 22 Desember 2020 di Kedutaan Besar AS di kota Rabat, Maroko (US Embassy Rabat, 2022). Presiden AS saat itu Donald Trump menganggap kesepakatan normalisasi Maroko-Israel sebagai “terobosan bersejarah” dan bagian dari “kemajuan besar bagi perdamaian di Timur Tengah” (AlJazeera, 2020).

Sebelum tercapainya normalisasi hubungan pada Desember 2020, hubungan Maroko-Israel sudah terjalin sejak lama, namun mengalami pasang-surut. Sebelum berdirinya Israel, Maroko merupakan negara di Afrika Utara dengan diaspora Yahudi terbesar. Kemudian, selama periode Perang Arab-Israel 1948, Perang Enam Hari 1967, dan Perang Yom Kippur 1973, Maroko yang dipimpin oleh Raja Hassan II secara diam-diam menjalin hubungan rahasia dengan Israel, walaupun ikut serta mendukung negara-negara Liga Arab (Segev & Shumacher, 2015). Pada tahun 1994, hubungan antara Maroko-Israel menjadi formal dengan dibukanya kantor perwakilan di masing-masing negara. Perdagangan di antara kedua negara pun berkembang. Namun, pada tahun Oktober 2000, bertepatan dengan terjadinya Intifada Kedua, hubungan Maroko-Israel dibekukan dikarenakan solidaritas Maroko terhadap rakyat Palestina (Taher, 2020). Normalisasi hubungan Maroko-Israel pada 2020 dianggap sebagai kelanjutan dari hubungan lama yang sempat beku (al-Ragawi, Amin, & Abujehesha, 2021).

Normalisasi hubungan dengan Israel mendapatkan protes dari dalam dan luar negeri Maroko. Sebelum dan sesudah tercapainya kesepakatan normalisasi, masyarakat Maroko yang dimotori oleh pihak oposisi pemerintah telah melakukan tiga kali demonstrasi besar menolak keputusan tersebut. Hal ini dikarenakan sikap mayoritas masyarakat Maroko yang masih pro terhadap Palestina (Barakah, 2020; Robbins, 2021). Sementara itu, pihak-pihak asing yang memprotes keputusan Maroko antara lain Hamas di Palestina, Iran, dan Aljazair. Mereka menganggap keputusan Maroko sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip Islam dan Arab, penyangkalan terhadap hak-hak rakyat Palestina, dan pelanggaran terhadap Inisiatif Perdamaian Arab 2002” (Reuters, 2020).

Studi sebelumnya tentang normalisasi Maroko-Israel membahas normalisasi kedua negara tersebut sebagai bagian dari keseluruhan proses normalisasi antara empat negara Arab dan secara teoritis berfokus pada perspektif realisme. Penelitian oleh Rimapradesi & Sahide (2021) menemukan bahwa normalisasi Maroko-Israel didorong oleh pilihan rasional Maroko yang dilatarbelakangi kepentingan keamanan dan ekonomi bagi negara tersebut (Rimapradesi & Sahide, 2021). Studi berikutnya oleh Seddik (2021) mengungkapkan bahwa negara-negara Arab, termasuk Maroko, memiliki kepentingan geopolitik di kawasan Timur Tengah, sehingga mau melakukan normalisasi (Seddik, 2021). Sementara itu, hasil penelitian Singer (2021) menunjukkan bahwa Maroko beserta negara-negara Arab lainnya memperoleh beberapa insentif seperti bantuan investasi keuangan dan militer dari Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi (Singer, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka artikel ini akan lebih berfokus pada studi kasus Maroko dengan pertanyaan penelitian “mengapa Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel?”. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berangkat dari paradigma realisme, artikel ini menggunakan pendekatan baru, yakni transaksionalisme. Penggunaan pendekatan ini guna mengungkap sisi lain dari kesepakatan normalisasi yang belum dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Pada dasarnya, transaksionalisme dalam diplomasi berdasarkan logika *quid pro quo*, yakni adanya imbalan setimpal dari setiap tindakan yang dilakukan, serta arena politik

dipandang sebagai *zero-sum game*. Dalam dunia transaksional, *quid pro quos* atau kesepakatan (*deals*) yang negara-negara ikuti hampir tidak terbatas. Oleh karena itu, setiap langkah kerja sama dalam bidang ekonomi, institusi, atau keamanan, menjadi aset yang sepadan dan memiliki potensi untuk ditransaksikan (Henke, 2017).

Transaksionalisme dalam politik luar negeri mulai populer semenjak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2016 (Fakude, 2017). Menurut Gvosdev (2018), transaksionalisme dalam politik luar negeri AS didefinisikan sebagai upaya untuk menggeser prinsip dasar dari keterlibatan AS dan untuk mendefinisikan serangkaian *quid pro quo* dalam keterlibatan AS (Gvosdev, 2018). Dengan kata lain, pendekatan ini bermaksud untuk meletakkan keuntungan nyata di atas nilai-nilai abstrak, dan dengan demikian mewakili sebuah transformasi dalam cara AS memberikan asistensi dan bantuan. Pemerintahan Trump berniat menggunakan program bantuan dan asistensi keuangan sebagai instrumen politik, bukan sebagai bagian dari alasan kemanusiaan (Ignac, 2019).

Inti dari pendekatan transaksionalis dalam kebijakan luar negeri adalah pendekatan tersebut secara spesifik memilih hubungan bilateral sambil merendahkan multilateralisme (Nye, 2019). Alasan atas pilihan ini adalah hubungan multilateral bersifat lebih kompleks untuk dipertahankan dibanding hubungan bilateral, dikarenakan multilateralisme melibatkan banyak aktor dengan kepentingan beragam. Multilateralisme juga biasanya memerlukan komitmen jangka panjang dari pihak-pihak yang terlibat untuk kesepakatan yang dinegosiasikan. Selain itu, multilateralisme biasanya menyediakan keuntungan jangka panjang dibandingkan keuntungan jangka pendek (Bashirov & Yilmaz, 2020). Sementara itu, kesepakatan bilateral biasanya kurang kompleks, lebih mudah diselesaikan, dan dapat memberikan keuntungan jangka pendek. Dengan cara yang sama, transaksionalisme membenci aliansi, institusi internasional, dan organisasi, karena entitas-entitas tersebut tidak membolehkan aktor transaksionalis untuk melakukan pendekatan kebijakan luar negeri dengan dasar kasus per kasus dan mengharaplan pemimpin politik untuk menghormati tujuan, kepentingan, norma, dan nilai-nilai kolektif institusi global (Ikenberry, 2017; Stokes, 2018).

Transaksionalisme juga secara terbuka menolak pembuatan kebijakan berdasarkan nilai-nilai, karena dianggap berbahaya terhadap kepentingan nasional. Hubungan transaksional tidak didasarkan pada nilai-nilai umum, kemudian ikatan sejarah bersama adalah pertimbangan sekunder. Transaksionalisme tidak berkehendak untuk berinvestasi dalam sistem internasional yang terbuka dan berdasarkan peraturan, tetapi cenderung berinvestasi dalam transaksi yang bersifat terpisah, bilateral, dan spesifik pada masalah tertentu. Kebencian transaksionalisme terhadap multilateralisme dan pembuatan kebijakan berbasis nilai sejalan dengan pandangan *zero-sum* yang ketat, di mana semua perolehan bersifat relatif dan tidak adanya resiprositas (Zenko & Lissner, 2017).

Kebijakan luar negeri transaksionalis erat berkaitan dengan perhatian terhadap kebijakan domestik, juga sering diasosiasikan dengan para pemimpin populis terkemuka seperti Donald Trump, Vladimir Putin, dan Recep Tayyip Erdogan. Para pemimpin populis ini menghendaki kesuksesan jangka pendek yang heboh dan dapat dengan cepat ditunjukkan ke penonton domestik untuk keuntungan politis. Hal ini mengarah pada keputusan kebijakan luar negeri yang dianggap impulsif (Zoellick, 2017).

Beberapa pengamat mengklaim bahwa kebijakan luar negeri transaksional sebenarnya merupakan versi 'kasar' dari realisme. Transaksionalisme dan realisme memang sepiintas mirip dalam hal ketidakpercayaan terhadap organisasi internasional dan ketidaksukaan terhadap pembuatan kebijakan berbasis nilai dan disposisi ideologis. Akan tetapi, terdapat tiga hal di mana transaksionalisme jelas berbeda dari realisme. Pertama, kebijakan luar negeri realis tidak terobsesi dengan kemenangan jangka pendek. Realisme meyakini perspektif perolehan relatif, tetapi hal ini tidak menjadikan realisme membenci komitmen jangka panjang. Kedua, realisme menganggap negara-negara sebagai aktor yang berperilaku mirip dalam kondisi yang sama. Pertimbangan politik domestik juga dianggap tidak memiliki peran signifikan dalam kebijakan luar negeri. Hal ini sangat kontras dengan transaksionalisme yang menganjurkan penggunaan keputusan politik luar negeri untuk mendapatkan keuntungan pada politik domestik. Ketiga, bagi politik luar negeri realis, gagasan kedaulatan dan prinsip non-intervensi adalah konsep kunci. Sifat tujuan transaksionalisme dalam meraih tujuan populis dalam negeri membuat kebijakan luar

negeri transaksional dapat ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain (Bashirov & Yilmaz, 2020).

Bashirov & Yilmaz (2020) kemudian menyimpulkan transaksionalisme sebagai sebuah pendekatan kebijakan luar negeri yang mengutamakan hubungan bilateral, berfokus pada kemenangan jangka pendek dibandingkan pandangan jangka panjang ke depan, meyakini pandangan *zero-sum* di mana semua keuntungan bersifat relatif dan absennya resiprositas, dan menolak pembuatan kebijakan berdasarkan nilai-nilai. Selain itu, kebijakan luar negeri transaksional erat dengan personal sosok populis dan berhubungan dengan pertimbangan politik dalam negeri yang memprioritaskan keuntungan politis dan konsolidasi kekuasaan. Kebijakan transaksional juga menawarkan pendekatan yang koheren dengan logika dasar dan konsistensinya.

Berdasarkan pada uraian tentang konsepsi transaksionalisme tersebut, maka hipotesis artikel ini adalah keputusan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel merupakan *deal* hasil transaksi yang dibuat Maroko dengan Amerika Serikat. Hal ini menjadi implikasi dari kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Donald Trump yang bergeser menjadi lebih transaksional. Maroko memperoleh ‘imbalan’ dari AS jika Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel yang selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu utama AS.

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif untuk menjelaskan kesepakatan yang membuat Maroko mau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel di tengah penolakan dari sebagian besar masyarakatnya. Data diperoleh melalui kajian dari sumber-sumber sekunder berupa artikel jurnal, dokumen-dokumen resmi pemerintah Maroko, Israel, maupun AS, laporan-laporan yang relevan, serta website berita daring. Data yang diperoleh kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber data, yakni menggali kebenaran informasi tertentu dengan mengambil kesimpulan dari pandangan berbeda di berbagai sumber perolehan data (Rahardjo, 2010). Data yang dianggap valid kemudian digunakan untuk memberi eksplanasi argumen transaksionalisme dalam normalisasi hubungan Maroko-Israel.

## Hasil dan Pembahasan

### *Sejarah Hubungan Maroko-Israel*

Hubungan Maroko dengan Israel dimulai sebelum pendirian Israel pada tahun 1948. Hubungan tersebut bersifat informal karena merupakan hubungan antara masyarakat Maroko dengan komunitas Yahudi yang telah terjalin sejak akhir abad 15. Maroko menjadi tempat pengungsian bangsa Yahudi yang diusir bersama kaum Muslim Spanyol ketika akhir Reconquista. Hingga tahun 1950an, populasi Yahudi di Maroko tercatat sekitar 300,000 orang dari 8 juta penduduk Maroko. Dengan didirikannya Israel hingga Perang Arab-Israel terakhir di tahun 1973, hampir semua masyarakat Yahudi Maroko telah pindah ke Israel. Namun, sebanyak 5,000 orang Yahudi bertahan di kota komersial Maroko, Kasablanka. Diperkirakan sekitar 1 juta penduduk Yahudi Israel memiliki garis keturunan asal Maroko (AP, 2013; Kibrik & Goren, 2021). Sebelum terjadinya normalisasi hubungan, setiap tahunnya sekitar 50,000 orang Israel mengunjungi Maroko setiap tahunnya untuk mempelajari sejarah keluarga mereka dan mengunjungi komunitas Yahudi di sana (Hanania, 2020).

Sementara itu, hubungan tingkat pemerintahan antara Maroko dengan Israel juga sudah berlangsung enam dekade. Hubungan antara Rabat dan Tel Aviv dimulai sejak akhir dekade 1950an saat pemerintahan Raja Hassan II. Hubungan dimulai dengan pengaturan masalah imigrasi etnis Yahudi Maroko menuju Israel (Levi, 2018). Hubungan ini bersifat tidak resmi dan kontroversial. Raja Hassan II kemudian membuka hubungan rahasia dan kerja sama terbatas dengan Israel, terutama dalam bidang intelijen. Dengan kerja sama ini, Raja Hassan II berkeinginan untuk memperkuat hubungan dengan AS melalui dukungan dari Israel (Segev & Shumacher, 2015).

Melalui dua orang mantan kepala badan intelijen Israel Mossad, yakni Isser Harel dan Meir Amit, Mossad menjalin kontak dengan kepala intelijen dan badan keamanan Maroko yang kemudian dikenal dengan Operasi Yachin. Raja Maroko juga membolehkan Mossad mendirikan pos permanen yang dilengkapi dengan alat komunikasi nirkabel untuk menjamin komunikasi antara intelijen Maroko dan Israel. Mossad menyediakan data intelijen terkait Aljazair yang ketika itu sedang berkonflik dengan Maroko (Segev &

Shumacher, 2015). Di sisi lain, Raja Hassan II menyediakan data intelijen yang vital bagi kemenangan Israel di Perang Enam Hari 1967. Data intelijen tersebut diambil pada tahun 1965, yakni ketika Raja Maroko memberikan Israel rekaman pertemuan kunci antara pemimpin-pemimpin Arab yang berdiskusi tentang persiapan perang terhadap Israel (Surkes, 2016).

Selain bidang intelijen, Maroko juga menjalin kerja sama bidang militer dengan Israel. Pilot-pilot dan kru darat AU Israel membantu pelatihan pilot AU Maroko. Israel juga menjual 100an lebih tank AMX-13 ke Maroko via Iran dan memberikan pelatihan pengoperasian tank kepada para komandan tank Maroko. Selain itu, Maroko membeli berbagai senjata ringan dari Israel (Segev & Shumacher, 2015).

Bagian terpenting dari hubungan Maroko-Israel adalah usaha Raja Hassan II mewujudkan perdamaian Arab-Israel dan memberikan solusi bagi masalah Palestina. Raja Hassan II berkontribusi terhadap proses perdamaian Mesir-Israel pada dekade 1970an. Pada tahun 1976, Raja Hassan II menjamu PM Israel Yitzhak Rabin untuk membicarakan dialog antara Israel dan Mesir (Levi, 2018). Raja Hassan II memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik dan menyediakan lokasi pertemuan yang ideal untuk tahap-tahap awal negosiasi perdamaian (Kibrik & Goren, 2021). Kelebihan Raja Hassan II dibanding pemimpin Arab lainnya adalah ia dipercaya baik oleh kubu Arab maupun Israel, dan ide-idenya selalu siap untuk didengarkan (Segev & Shumacher, 2015).

Seiring berjalannya waktu, pertukaran kunjungan pejabat Israel dan Maroko menjadi sering, walaupun hubungan formal antara kedua negara belum terjalin. Kunjungan didominasi oleh pejabat intelijen dan militer kedua negara. Puncaknya pada 22 Juli 1986, Raja Hassan II menerima kunjungan PM Israel Shimon Peres di Maroko (Taher, 2020). Pada 1 September 1994, hubungan formal antara Maroko-Israel dimulai dengan dibukanya kantor penghubung Israel di Rabat. Dua tahun kemudian, Maroko juga membuka kantor penghubung di Israel. Setelah dibukanya kantor penghubung di Israel dan Maroko, hubungan ekonomi kedua negara menjadi cukup erat. Pada tahun 1999, volume perdagangan antara Israel-Maroko mencapai \$50 juta, dan menurut kantor penghubung Israel, 50,000 warga Israel mengunjungi Maroko di tahun itu (Taher, 2020).

Akan tetapi, setahun kemudian kerja sama kedua negara terganggu dengan pengumuman ditutupnya kantor penghubung Israel di Maroko pada 23 Oktober 2000 setelah terjadinya Intifada Kedua Palestina dan pengumuman pemerintah Israel untuk menghentikan proses perdamaian dengan Palestina. Walaupun begitu, hubungan antara pemerintah Maroko dengan Israel masih tetap terjalin. pada 1 September 2004, Menlu Israel saat itu Silvan Shalom mengunjungi Maroko dan bertemu dengan Raja Mohammed VI. Rangkaian pertemuan dan interaksi antara para pejabat kedua negara juga sering terjadi setelahnya sebelum normalisasi hubungan diplomatik pada 10 Desember 2020 (Taher, 2020).

Normalisasi hubungan diplomatik pada Desember 2020 disebut oleh pejabat Maroko sebagai “melanjutkan kembali” hubungan yang dimulai pada 1994, namun ditangguhkan pada tahun 2000 (al-Ragawi et al., 2021). Walaupun tidak ada hubungan resmi, pemerintah kedua negara menjalin hubungan ramah secara rahasia. Sebelum normalisasi, warga Israel yang bepergian ke Maroko juga masih memperoleh *visa on arrival*. Akan tetapi, mereka harus menggunakan penerbangan dari negara lain seperti Mesir atau Yordania untuk terbang ke Maroko (Tharoor, 2020).

### *Peran Amerika Serikat dalam Proses Normalisasi*

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menjadi aktor utama yang mengatur normalisasi empat negara dunia Islam di kawasan Timur Tengah dengan Israel. Administrasi Trump menjadi perantara utama proses komunikasi dan negosiasi antara empat negara Arab dengan Israel. Begitupun pada kasus Maroko, pengumuman normalisasi hubungan dengan Israel disampaikan oleh Trump melalui akun Twiternya pada 10 Desember 2020. Kesepakatan normalisasi yang terwujud atas peran AS menjadi kemenangan diplomatik bagi pemerintahan Trump di akhir masa jabatannya sebagai presiden AS (Jakes, Kershner, Alami, & Halbfinger, 2020).

Peran AS sebagai mediator antara negara-negara Arab dengan Israel sudah terjadi sejak lama. Sejak akhir Perang Yom Kippur 1973, AS telah aktif berpartisipasi dalam semua negosiasi perdamaian Arab-Israel sebagai pihak ketiga yang menjadi mediator. Di

antara inisiatif perdamaian yang melibatkan AS dimulai dari Konferensi Perdamaian Timur Tengah tahun 1973 di Jenewa yang memulai proses perdamaian Timur Tengah, kemudian Perjanjian Camp David tahun 1978, Konferensi Perdamaian Timur Tengah tahun 1991 di Madrid, hingga Kesepakatan Oslo Israel-PLO tahun 1993 yang ditandatangani di Washington, juga perjanjian normalisasi tahun 2020. AS selalu memainkan peran penting memediasi perjanjian perdamaian Timur Tengah (Singer, 2021).

Selama usaha mediasi perdamaianya, Amerika Serikat terkadang menggunakan teknik “menambah bagian kue” ketika pihak-pihak yang sedang bernegosiasi gagal mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. AS melengkapi komitmen pihak-pihak tersebut dengan cara menyediakan berbagai jenis jaminan dan janji kepada para pihak yang terlibat. Dengan demikian, contohnya pada hari yang sama Israel dan Mesir menandatangani Perjanjian Sementara tahun 1975, di mana Israel mundur secara parsial dari Sinai sebagai imbalan beberapa langkah Mesir menuju perdamaian, Amerika Serikat menekan MoU dengan Israel yang di dalamnya AS menjanjikan Israel dengan berbagai komitmen, termasuk penyediaan bantuan militer dan ekonomi, suplai minyak, dan dukungan di berbagai organisasi internasional. Amerika Serikat juga memberikan Mesir dengan seperangkat jaminan yang mirip (Singer, 2021).

Pada perjanjian normalisasi empat negara Dunia Islam di tahun 2020, Amerika Serikat melanjutkan perannya sebagai perantara perdamaian Arab-Israel. Proses menuju normalisasi dimulai pada Juni 2020 dari Uni Emirat Arab. Saat itu, Uni Emirat Arab menentang rencana aneksasi Israel terhadap wilayah Tepi Barat dalam berdasarkan kerangka Rencana Perdamaian Timur Tengah yang diinisiasi oleh Donald Trump. Duta Besar UEA kepada AS Yousef Al-Otaiba menyatakan bahwa rencana Israel menganeksasi Tepi Barat akan mengancam rencana normalisasi dengan negara-negara Arab yang juga termuat dalam Rencana Perdamaian Trump. Pada akhir Juni, Dubes Al-Otaiba mendekati Jared Kushner selaku Penasihat Senior Gedung Putih sekaligus menantu Trump dan Avi Berkowitz selaku utusan Gedung Putih dengan proposal bahwa UEA akan setuju menormalisasi hubungan dengan Israel, sebagai balasannya Israel harus mengumumkan pembatalan aneksasi Tepi Barat (Barak, 2020).

Proposal normalisasi kemudian disampaikan oleh Berkowitz kepada PM Israel Benjamin Netanyahu pada akhir Juni 2020. Di bulan berikutnya, Kushner berbicara melalui telpon dengan Putera Mahkota UEA Muhammad bin Zayed (MBZ). Kushner dan Berkowitz juga bertemu secara intens dengan Dubes Israel Ron Dermer dan Dubes UEA Al-Otaiba. Pada 12 Agustus 2020, kesepakatan difinalisasi dalam panggilan konferensi antara Presiden Trump, PM Netanyahu, dan Pangeran MBZ (Barak, 2020). Kemudian pada 13 Agustus 2020, UEA secara resmi menyetujui normalisasi dengan Israel melalui panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump. Momen ini menjadi perjanjian perdamaian pertama antara Israel dengan negara Arab dalam kurun waktu 25 tahun dan menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga yang menjalin hubungan diplomatik setelah Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994 (Harkov & Nahmias, 2020).

Normalisasi hubungan diplomatik UEA-Israel kemudian diresmikan pada 15 September 2020 di Gedung Putih, Washington DC, AS. Pada acara peresmian tersebut, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani juga turut hadir dan menyatakan bahwa Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel. Menlu Bahrain bersama dengan Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan dan PM Israel Benjamin Netanyahu menandatangani “Deklarasi Perjanjian Abraham”, sebuah deklarasi politik yang menyerukan promosi perdamaian dan kerja sama di Timur Tengah. Sebagaimana tertera dalam deklarasi, nama perjanjian tersebut berasal dari Abraham (Ibrahim) yang merupakan bapak dari tiga agama monoteis Yudaisme (Yahudi), Kristen, dan Islam. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump juga menandatangani Perjanjian Abraham sebagai saksi, juga turut serta dalam dua dokumen bilateral lainnya yang ditandatangani di Washington (Singer, 2021).

Pada 23 Oktober 2020, Sudan dan Israel juga sepakat untuk menormalisasi hubungan mereka. Dalam deklarasi bersama yang diumumkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan Abdel Fattah al-Burhan, Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok, dan Presiden AS Donald Trump, para pemimpin negara tersebut setuju “untuk normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel serta mengakhiri status bermusuhan antara negara mereka”. Kemudian pada 22 Desember 2020, Israel,

Maroko, dan Amerika Serikat menandatangani Deklarasi Bersama yang berisi pembentukan hubungan diplomatik penuh, damai, dan ramah antara Maroko dan Israel. Kedua negara juga berkomitmen untuk menormalisasi hubungan dalam berbagai bidang, termasuk membuka sesegera mungkin penerbangan komersial langsung antara dua negara (Singer, 2021).

Peran AS menjadi perantara perdamaian antara empat negara dunia Islam bukan hanya dilatarbelakangi oleh keinginan mempererat hubungan AS dengan keempat negara tersebut dan statusnya sebagai sekutu utama Israel, tetapi juga terdapat motif jangka pendek. Menurut Rehman (2020), pemerintahan Donald Trump memiliki kepentingan politik pribadi. Pertama, pemerintah AS menjadikan kesepakatan normalisasi Arab-Israel sebagai bahan promosi. Penasihat Keamanan Nasional AS Robert C. O'Brien merekomendasikan Trump sebagai kandidat Hadiah Nobel Perdamaian atas perannya dalam inisiatif normalisasi Arab-Israel. Walaupun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti, deklarasi Perjanjian Abraham merupakan kabar baik bagi Trump dan memberinya banyak pujian. Kedua, inisiatif normalisasi meredakan isu aneksasi Tepi Barat dan menjadikan peran Trump sebagai contoh diplomasi baik. Ketiga, Trump memperoleh bahan modal kampanye sebelum pemilihan presiden AS pada November 2020 (Rehman, 2020).

### *Transaksionalisme dalam Perjanjian Abraham*

Perjanjian Abraham menjadi ‘payung’ dari semua kesepakatan normalisasi antara empat negara dunia Islam dengan Israel. Perjanjian ini mencakup penandatanganan deklarasi perdamaian trilateral antara UEA dan Bahrain dengan Israel yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, juga rangkaian perjanjian yang ditandatangani ketiga pihak setelahnya. Pada 15 September 2020, di hari yang sama dengan Deklarasi Perjanjian Abraham, terjadi penandatanganan dokumen bilateral antara UEA-Israel dan Bahrain-Israel.

Dokumen bilateral sebagai perjanjian perdamaian resmi yang ditandatangani UEA dan Israel disebut “Kesepakatan Perdamaian Perjanjian Abraham: Perjanjian Damai,

Hubungan Diplomatik, dan Normalisasi Penuh”. Sementara itu, Bahrain dan Israel menandatangani deklarasi singkat yang diberi judul “Perjanjian Abraham: Deklarasi Perdamaian, Kerja Sama, dan Hubungan Diplomatik Konstruktif dan Ramah”, yang di dalamnya kedua belah pihak mengumumkan keinginan mereka membangun hubungan damai dan memasuki serangkaian kesepakatan normalisasi dalam semangat Deklarasi Perjanjian Abraham. Tiga hari kemudian di Manama, Bahrain dan Israel menandatangani perjanjian damai resmi yang diberi judul “Pengumuman Resmi Bersama dalam Pembentukan Hubungan Diplomatik, Damai, dan Ramah”.

Pada 6 Januari 2021, Sudan yang sebelumnya telah menyepakati untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Oktober 2020, secara resmi menandatangani Perjanjian Abraham. Penandatanganan dilakukan di Kedutaan Besar AS di Khartoum, Sudan. Pihak Sudan diwakili oleh Menteri Kehakiman Nasereldin Abdelbari sementara Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mewakili AS untuk menandatangani perjanjian tersebut (Mohiedeen, 2021). Sementara itu, Deklarasi Bersama antara Maroko-Israel yang ditandatangani setelahnya pada 22 Desember 2020 juga dimuat dalam halaman Perjanjian Abraham pada website Kementerian Luar Negeri AS, walaupun dalam deklarasi tersebut tidak secara spesifik disebutkan sebagai bagian dari Perjanjian Abraham (Singer, 2021).

Amerika Serikat dalam menjadi mediator Perjanjian Abraham masih konsisten dengan praktik lama dengan memberikan beberapa ‘komitmen insentif’ terhadap pihak negara-negara Arab. Komitmen AS menjadi bukti *deal* transaksional dalam perjanjian normalisasi Arab-Israel tersebut. Media Anadolu Agency menganggap kesepakatan tersebut sebagai praktik suap (al-Ragawi et al., 2021).

Insentif AS kepada Maroko menjadi yang paling signifikan dibandingkan tiga negara Arab lainnya. Pada 10 Desember 2020, bersamaan dengan pernyataan normalisasi Maroko-Israel, AS mengakui kedaulatan Maroko terhadap keseluruhan wilayah Sahara Barat yang dianggap wilayah sengketa oleh PBB, Uni Eropa, dan Uni Afrika (Lister, 2020). Tidak seperti insentif AS terhadap negara-negara Arab lain anggota Perjanjian Abraham yang tidak termasuk sebagai bagian formal kesepakatan normalisasi, pengakuan AS

terhadap kedaulatan Maroko di Sahara Barat tertera secara resmi sebagai bagian dari Deklarasi Bersama Maroko-Israel-AS (Singer, 2021).

Selain pengakuan kedaulatan terhadap klaim Maroko, AS juga menandatangani MoU rencana pembiayaan proyek investasi swasta sebesar US\$ 3 milyar, yang sebagian besar akan diperuntukkan bagi bank-bank di Maroko, hotel-hotel, dan perusahaan energi terbarukan milik raja Maroko (Jakes et al., 2020). Lebih lanjut lagi, pada 11 Desember 2020, kabinet Trump memberitahu Kongres AS tentang rencana penjualan peralatan militer kepada Maroko senilai US\$1 milyar, termasuk drone canggih MQ-9B Sea Guardian dan sistem pertahanan udara Patriot PAC-3. Pentagon mengkonfirmasi penjualan tersebut pada November 2021 (Dumpis, 2021; Latrech, 2021).

### *Isu Sahara Barat Dalam Kesepakatan Normalisasi Maroko-Israel*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengakuan klaim Maroko terhadap Sahara Barat menjadi insentif utama yang diberikan AS kepada Maroko sebagai ‘imbalan’ normalisasi hubungan dengan Israel. Wilayah yang terletak di sebelah selatan dan barat daya Maroko ini dikontrol dan diklaim oleh Maroko sejak tahun 1975. Akan tetapi, komunitas internasional tidak mengakui klaim Maroko tersebut. Hal ini dikarenakan PBB menetapkan Sahara Barat sebagai *non-self-governing territory* (Lister, 2020; Raghavan, 2020).

Wilayah Sahara Barat mencakup area seluas 280,000 km<sup>2</sup> dengan populasi sekitar 500,000 jiwa, yang sebagian besar tinggal di Laayounne, kota terbesar di Sahara Barat. Sahara Barat terletak di kawasan Maghreb, sebelah barat laut benua Afrika. Penduduknya dikenal dengan etnis Sahrawi dan sebagian besar tinggal di perkotaan kecil dan pedesaan. Ekonomi wilayah ini ditunjang oleh sektor pertanian dan perikanan yang hasilnya menjadi konsumsi utama masyarakat lokal. Komoditas ekspor utama adalah mineral fosfat. Selain itu, terdapat juga deposit minyak di lepas pantai Sahara Barat. Sumber daya alam ini menjadi salah satu sumber masalah sengketa di wilayah tersebut (Simon, 2014).

Sahara Barat yang sebelumnya dikenal dengan Sahara Spanyol menjadi koloni Spanyol pada 1884. Kemudian pada tahun 1958, Sahara Barat dideklarasikan sebagai

provinsi Spanyol. Pada tahun 1963, Sahara Barat ditetapkan sebagai *non-self-governing territory* oleh PBB, setelah Spanyol mendapat tekanan dari Majelis Umum PBB dan Organization of African Unity (AOU) untuk mendekolonisasi dan memberikan hak menentukan nasib sendiri. *Non-self-governing territory* adalah wilayah yang belum memperoleh pemerintahan sendiri secara penuh. Ketetapan PBB ini dimasukkan dalam daftar *non-self-governing territory* Pasal 73 lit. e) Bab IX Piagam PBB tentang ‘Deklarasi Terkait *Non-Self-Governing Territories*. Hingga kini status Sahara Barat masih belum berubah dalam daftar tersebut, sehingga secara *de jure* Spanyol menjadi negara administrator Sahara Barat (Simon, 2014).



Gambar 1. Peta Wilayah Sahara Barat (Tharoor, 2020).

Aneksasi Maroko terhadap Sahara Barat dimulai pada November 1975, yakni peristiwa ‘Green March’ di mana 350,000 warga sipil Maroko bersama dengan 25,000 personil militer Maroko menyeberangi perbatasan. Sengketa memanas ketika penguasaan Spanyol di Sahara Barat berakhir pada 27 Februari 1976. Di hari berikutnya, Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) dideklarasikan oleh Front Polisario yang kemudian aktif berperang melawan Maroko selama 15 tahun. Pada tahun 1991, di bawah misi United

Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) PBB memediasi gencatan senjata antara Maroko dengan Front Polisario (Tharoor, 2020). Hingga kini, Maroko menduduki 85 persen wilayah Sahara Barat dan secara *de facto* menjadi administrator teritori tersebut. Bagian sisanya dikontrol oleh Front Polisario melalui Republik Demokratik Arab Sahrawi (Simon, 2014).

Front Polisario membentuk pemerintahan-di-pengasingan yang bertempat di Aljazair. Sebanyak 38 negara yang sebagian besar berasal dari Afrika dan Amerika latin mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan SADR, yang juga menjadi anggota Uni Afrika pada tahun 1984. PBB, Uni Eropa, negara anggota Uni Afrika yang tidak menjalin hubungan dengan SADR, serta negara-negara lain di dunia bersikap netral dengan menganggap status Sahara Barat sebagai *non-self-governing territory*, sesuai ketentuan resmi PBB (Raghavan, 2020).

### *Peran AS dalam Proses Negosiasi Normalisasi Maroko-Israel*

Dalam konteks normalisasi hubungan Maroko-Israel yang disponsori oleh Amerika Serikat, telah diketahui bahwa Sahara Barat menjadi isu sentral pada kesepakatan tersebut. Proses negosiasi menuju normalisasi yang melibatkan isu Sahara Barat telah berlangsung dua tahun sebelum normalisasi terjadi. Penasihat senior sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, bersama dengan utusan khusus Gedung Putih Avi Berkowitz telah berkomunikasi sejak tahun 2018 dengan pemerintah Maroko terkait kemungkinan normalisasi hubungan Maroko-Israel dengan pengakuan AS terhadap Sahara Barat sebagai imbalannya (Ravid, 2020).

Ide menjadikan Sahara Barat sebagai ‘aset transaksi’ datang dari kelompok pejabat Israel yang dipimpin oleh mantan wakil direktur Mossad Ram Ben Barak. Perusahaan Ben Barak melakukan bisnis di Maroko dengan Yariv Elbaz, seorang Yahudi Maroko yang memiliki salah satu usaha ritel makanan terbesar di Maroko dan kenalan dekat Menlu Maroko Nasser Bourita. Pada tahun 2018, Ben Barak dan Elbaz berbicara dengan Bourita dan penasihat keamanan Netanyahu Jason Grenblatt membahas tentang ide Sahara Barat sebagai imbalan kesepakatan normalisasi dengan Israel. Inisiatif tersebut tidak memperoleh

kemajuan, namun Elbaz mendapatkan koneksi dengan Jared Kushner melalui Grenblatt. Kemudian pada Mei 2019, Elbaz bertemu Kushner saat kunjungan tim Gedung Putih ke Casablanca, Maroko (Ravid, 2020).

Selama kunjungan ke Maroko, Kushner bertemu dengan Raja Mohammed VI yang membahas tentang isu pengakuan AS terhadap Sahara Barat. Pertemuan ini memperjelas pentingnya isu tersebut bagi bangsa Maroko. Beberapa pekan kemudian Menlu Maroko Bourita berkunjung ke Gedung Putih dan membahas lagi isu Sahara Barat. Kushner memutuskan untuk berinisiatif mendorong isu Sahara Barat. Kushner, Berkowitz, dan Bourita secara efektif sepakat sejak tahun 2019, tetapi Senator Partai Republik Jim Inhofe yang dekat dengan Trump dan penasihat keamanan nasional John Bolton menentang ide tersebut karena dianggap ‘menjual’ hak kemerdekaan rakyat Sahara Barat. Akan tetapi, pada hubungan Trump dengan Inhofe memburuk pada awal Desember 2020 karena perselisihan terkait National Defense Authorization Act atau undang-undang pembiayaan militer. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kushner dan Berkowitz untuk menyelesaikan kesepakatan Maroko. Trump kemudian menyetujui kesepakatan tersebut, dan pihak Maroko ketika dihubungi menyatakan masih tertarik dengan rencana kesepakatan yang dibahas setahun sebelumnya (Ravid, 2020).

Akhirnya, pada 10 Desember 2020, Trump secara resmi mengumumkan kesepakatan normalisasi Maroko-Israel melalui akun Twitter-nya. Selain itu, Trump juga mengumumkan AS akan membuka konsulat di Dakhla, kota pariwisata di Sahara Barat. Pernyataan Trump kemudian dikonfirmasi oleh kabinet kerajaan Maroko dan Kemenlu Maroko. Walaupun hubungan diplomatik antara Maroko dengan Israel telah dinormalisasi, Maroko belum berkomitmen untuk membuka kedutaan besar di Israel. Maroko hanya akan membuka kantor penghubung seperti sebelum tahun 2000 (Abouzzohour, 2020).

Sementara di pihak Maroko, pemerintah Maroko memanfaatkan pemerintahan Trump yang masa jabatannya segera usai untuk mempromosikan kepentingan diplomatik dan keamanannya. Pemerintahan Trump juga sangat ingin meningkatkan legitimasi dan signifikansi rencana perdamaianya dalam waktu yang terbatas. Pemerintah Maroko yang

tujuan strategi diplomatiknya memperoleh pengakuan internasional atas klaimnya di Sahara Barat, kemudian memanfaatkan kesempatan langka ini (Abouzzohour, 2020).

Pengakuan AS terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat menjadi kemenangan nasional yang mendongkrak popularitas kepemimpinan Maroko di tengah mayoritas masyarakat yang antipati terhadap normalisasi dengan Israel (Tharoor, 2020). Hal ini terlihat dari hasil survei Arab Barometer, di mana 41 persen warga Maroko mendukung kesepakatan normalisasi dengan Israel karena imbalan pengakuan AS terhadap kedaulatan Maroko di Sahara Barat (Robbins, 2021). Walaupun hasil tersebut masih kalah dibandingkan dengan 59 persen masyarakat Maroko yang menolak, telah terjadi pergeseran opini publik yang signifikan. Pasalnya, pada survei Arab Opinion Index yang dilakukan antara 2019-2020 dan hasilnya diterbitkan pada November 2020 atau sebulan sebelum pengumuman normalisasi Maroko-Israel, 88 persen penduduk Maroko yang disurvei menyatakan menolak pengakuan diplomatik terhadap Israel, dan 70 persen memandang isu Palestina perlu lebih menjadi perhatian utama bangsa Arab (Arab Center, 2020).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini mengidentifikasi beberapa hal yang menunjukkan adanya transaksionalisme dalam proses normalisasi hubungan Maroko dengan Israel. Amerika Serikat sebagai negara sekutu utama Israel memberikan tiga insentif atau imbalan kepada Maroko agar kesepakatan normalisasi tercapai. Imbalan paling besar adalah Amerika Serikat memberikan pengakuan kedaulatan atas kontrol Maroko di wilayah Sahara Barat yang selama ini diakui oleh PBB dan komunitas internasional sebagai *non-self-governing territory*. Selain itu, terdapat imbalan tambahan berupa pemberian dana investasi sebesar \$3 milyar dan penjualan alutsista modern dengan nilai \$1 milyar. Imbalan kepada Maroko ini menjadi pemberian paling dermawan dari AS dibanding tiga negara Arab lainnya yang juga menormalisasi hubungan dengan Israel.

Transaksionalisme dalam kesepakatan normalisasi Maroko-Israel juga dapat dilihat dari kesepakatan yang berlawanan dengan multilateralisme berupa ketetapan PBB terkait Sahara Barat dan nilai-nilai (*value*) yang dianut oleh Maroko maupun AS. Pengakuan AS

terhadap klaim Maroko di Sahara Barat bertentangan dengan nilai-nilai (*value*) anti penjajahan dan hak menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*) suatu bangsa yang dianut oleh dunia internasional masa kini. Selain itu, pemerintah Maroko telah melanggar nilai-nilai (*value*) solidaritas terhadap Palestina yang masih dipegang oleh sebagian besar masyarakat Maroko.

Aspek transaksionalisme berikutnya yang dapat ditemukan pada normalisasi Maroko-Israel adalah keuntungan populis yang diperoleh masing-masing pihak pemerintahan AS di bawah Donald Trump dan pemerintah Maroko. Keberhasilan AS mensponsori kesepakatan normalisasi menjadi bahan promosi untuk menaikkan citra Trump. Sementara itu, popularitas pihak pemerintah Maroko mengalami kenaikan karena berhasil memperoleh pengakuan atas klaimnya di Sahara Barat. Hal ini juga menambah pamor Kementerian Luar Negeri Maroko karena berhasil memenuhi salah satu tujuan politik luar negeri negara tersebut.

Konsep transaksionalisme telah membantu pemahaman terkait praktik diplomasi yang bersifat transaksional, layaknya negosiasi dalam bisnis. Imbalan berupa keuntungan materi, pemenuhan tujuan politik luar negeri suatu negara, dan tujuan populis dapat mendorong pemimpin suatu negara tersebut membuat kesepakatan yang bertentangan dengan kehendak rakyatnya. Akan tetapi, penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan tema normalisasi Arab-Israel belum banyak membahas dari sisi Israel. Oleh karena itu, penelitian di masa depan dapat menginvestigasi tentang proses normalisasi dari sisi Israel.

## Referensi

- Abouzzohour, Y. (2020, December 14). Morocco's partial normalization with Israel comes with risks and gains. Retrieved June 6, 2022, from brookings.edu website: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/14/moroccos-partial-normalization-with-israel-comes-with-risks-and-gains/>
- al-Ragawi, M., Amin, M., & Abujehesha, M. (2021, January 13). How US bribed Arab states to normalize ties with Israel. Retrieved June 5, 2022, from Anadolu Agency website: <https://www.aa.com.tr/en/politics/how-us-bribed-arab-states-to-normalize-ties-with-israel/2108054>
- Al Jazeera. (2020, December 10). Israel, Morocco agree to normalise relations in US-brokered deal. Retrieved from Aljazeera website: <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/10/israel-morocco-agree-to-normalise-relations-in-us-brokered-deal>
- AP. (2013, February 27). Morocco film searches out Jews who left for Israel. Retrieved June 5, 2022, from Alarabia News website: <https://english.alarabiya.net/articles/2013/02/27/268524>
- Arab Center. (2020, November 16). The 2019-2020 Arab Opinion Index: Main Results in Brief. Retrieved June 6, 2022, from Arab Center Washington DC website: <https://arabcenterdc.org/resource/the-2019-2020-arab-opinion-index-main-results-in-brief/>
- Barak, R. (2020, August 14). Behind the scenes: How the Israel-UAE deal came together. Retrieved June 5, 2022, from Axios website: <https://www.axios.com/2020/08/13/how-the-israel-uae-recognition-deal-came-together>
- Barakah, T. El. (2020, September 19). Moroccans protest Arab nations normalizing ties with Israel. Retrieved June 4, 2022, from Associated Press website: <https://apnews.com/article/virus-outbreak-bahrain-israel-ap-top-news-united-arab-emirates-e9b902800205dd85d3ef10cbe55185fa>
- Bashirov, G., & Yilmaz, I. (2020). The rise of transactionalism in international relations: evidence from Turkey's relations with the European Union. *Australian Journal of International Affairs*, 74(2), 165–184. <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1693495>
- Carter, J. (2021, September 10). Camp David Accords. Retrieved June 3, 2022, from Encyclopedia Britannica website: <https://www.britannica.com/event/Camp-David-Accords>

- Dumpis, T. (2021, January 21). US Military Sales to Morocco Doubled in 2020. Retrieved June 5, 2022, from Morocco World News website: <https://www.moroccoworldnews.com/2021/01/332729/us-military-sales-to-morocco-doubled-in-2020>
- Eichensehr, K. (2021). Trump Administration Brokers Accords to Normalize Relations Between Israel and Six Countries. *American Journal of International Law*, 115(1). <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.96>
- Fakude, T. (2017, March 10). How transactional politics will affect journalism. Retrieved June 4, 2022, from Aljazeera website: <https://www.aljazeera.com/opinions/2017/3/10/how-transactional-politics-will-affect-journalism>
- Gvosdev, N. (2018, October 31). Sanders’ “Selective Engagement” versus Transactional Internationalism. Retrieved June 4, 2022, from Ethics & International Affairs website: <https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2018/sanders-selective-engagement-versus-transactional-internationalism/>
- Hanania, R. (2020, December 11). Trump announces Morocco and Israel will normalize relations. Retrieved June 5, 2022, from Arab News website: <https://www.arabnews.com/node/1775376/middle-east>
- Harkov, L., & Nahmias, O. (2020, August 14). Israel, UAE reach historic peace deal: ‘We can make a wonderful future.’ Retrieved June 5, 2022, from The Jerusalem Post website: <https://www.jpost.com/breaking-news/israel-and-uae-reach-historic-peace-deal-638524>
- Henke, M. (2017, February 8). Trump’s Transactional Diplomacy: A Primer. Retrieved June 4, 2022, from [politicalviolenceataglace.org](http://politicalviolenceataglace.org) website: <https://politicalviolenceataglace.org/2017/02/08/trumps-transactional-diplomacy-a-primer/>
- Holland, S., Williams, D., & Yaakoubi, A. El. (2020, September 11). Bahrain follows Emirates in normalizing ties with Israel. Retrieved June 3, 2022, from Reuters website: <https://www.reuters.com/article/us-israel-bahrain-usa-idUSKBN26226T>
- Ignac, L. (2019, November 4). Transactionalism in U.S. Foreign Policy. Retrieved June 4, 2022, from The Prindle Post website: <https://www.prindlepost.org/2019/11/transactionalism-in-u-s-foreign-policy/>
- Ikenberry, J. (2017). The Plot Against American Foreign Policy: Can the Liberal Order Survive. *Foreign Affairs*, 96(3), 156–178. Retrieved from

<https://www.jstor.org/stable/i40204443>

- Jakes, L., Kershner, I., Alami, A., & Halbfinger, D. (2020, December 10). Morocco Joins List of Arab Nations to Begin Normalizing Relations With Israel.
- Kibrik, R., & Goren, N. (2021, May 8). How Morocco relates to the Israeli-Palestinian peace process - opinion. Retrieved June 7, 2022, from The Jerusalem Post website: <https://www.jpost.com/opinion/how-morocco-relates-to-the-israeli-palestinian-peace-process-opinion-667592>
- Latrech, O. (2021, November 18). Pentagon Approves Morocco's Purchase of Patriot Air Defense System. Retrieved June 5, 2022, from Morocco World News website: <https://www.moroccoworldnews.com/2021/11/345601/pentagon-approves-morocco-s-purchase-of-patriot-air-defense-system>
- Levi, E. (2018). *Israel and Morocco: Cooperation Rooted in Heritage*. Ramat Gan. Retrieved from [https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Einat\\_Levi\\_-\\_Israel\\_and\\_Morocco\\_-\\_Cooperation\\_Rooted\\_in\\_Heritage\\_-\\_September\\_2018.pdf](https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Einat_Levi_-_Israel_and_Morocco_-_Cooperation_Rooted_in_Heritage_-_September_2018.pdf)
- Lister, T. (2020, December 12). Trump deal with Morocco is yet another headache for Biden team. Retrieved June 6, 2022, from CNN website: <https://edition.cnn.com/2020/12/12/politics/trump-morocco-analysis-intl/index.html>
- Mohiedeen, N. (2021, January 7). Sudan Signs on to Abraham Accords, Normalizing Relations With Israel. Retrieved June 5, 2022, from VOA Africa website: [https://www.voaafrica.com/a/africa\\_sudan-signs-abraham-accords-normalizing-relations-israel/6200455.html](https://www.voaafrica.com/a/africa_sudan-signs-abraham-accords-normalizing-relations-israel/6200455.html)
- Nye, J. S. (2019). The rise and fall of American hegemony from Wilson to Trump. *International Affairs*, 95(1), 63–80. <https://doi.org/10.1093/ia/iyy212>
- Raghavan, S. (2020, December 11). U.S. recognition of Morocco's claim over disputed region threatens more tension. Retrieved June 6, 2022, from The Washington Post website: [https://www.washingtonpost.com/world/africa/western-sahara-morocco-israel-trump/2020/12/11/cd4176b2-3b81-11eb-aad9-8959227280c4\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/africa/western-sahara-morocco-israel-trump/2020/12/11/cd4176b2-3b81-11eb-aad9-8959227280c4_story.html)
- Rahardjo, M. (2010, October 15). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Retrieved June 4, 2022, from GEMA UIN Malang website: <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Ravid, B. (2020, December 11). Scoop: Fallout between Trump and top GOP senator made Morocco-Israel deal possible. Retrieved June 6, 2022, from Axios website: <https://www.axios.com/2020/12/11/trump-morocco-israel-inhofe>

- Rehman, A. U. (2020). Causes behind the Abraham Accord and its consequences for the Peace Process in the Middle East. *The Middle East Journal*, 2(4), 73–83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4314077>
- Reuters. (2020, December 11). Russia Says U.S. Backing for Moroccan Claim on Western Sahara Breaches International Law. Retrieved June 4, 2022, from Haaretz website: <https://www.haaretz.com/world-news/2020-12-11/ty-article/russia-says-u-s-backing-for-moroccan-claim-on-western-sahara-illegal/0000017f-db6c-d3a5-af7f-fbee147c0000>
- Riedel, B. (2019, October 23). 25 years on, remembering the path to peace for Jordan and Israel. Retrieved June 3, 2022, from brookings.edu website: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/25-years-on-remembering-the-path-to-peace-for-jordan-and-israel/>
- Rimapradesi, Y., & Sahide, A. (2021). Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v4i1.2673>
- Robbins, M. (2021, June 7). The Biden Honeymoon: Changing views of the US across Arab Barometer Wave 6. Retrieved June 4, 2022, from Arab Barometer website: <https://www.arabbarometer.org/2021/06/the-biden-honeymoon-changing-views-of-the-us-across-arab-barometer-wave-6/>
- Seddik, A. E. H. (2021). Geopolitics of the Arab-Israeli Normalization. *Journal of Afro Asian Studies*, 2(8).
- Segev, S., & Shumacher, Y. (2015). Israel—Morocco Relations From Hassan II to Muhammad VI. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 2(3), 49–60. <https://doi.org/10.1080/23739770.2008.11446330>
- Simon, S. (2014). Western Sahara. In *Self-Determination and Secession in International Law* (pp. 255–272). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198702375.003.0013>
- Singer, J. (2021). The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco. *International Legal Materials*, 60(3), 448–463. <https://doi.org/10.1017/ilm.2021.18>
- Stokes, D. (2018). Trump, American hegemony and the future of the liberal international order. *International Affairs*, 94(1), 133–150. <https://doi.org/10.1093/ia/iix238>
- Surkes, S. (2016, October 16). Morocco tipped off Israeli intelligence, ‘helped Israel win

Six Day War.’ Retrieved June 5, 2022, from The Times of Israel website: <https://www.timesofisrael.com/morocco-tipped-off-israeli-intelligence-helped-israel-win-six-day-war/>

Taher, A. bin. (2020, December 20). Morocco, Israel: 6 decades of secret ties, cooperation. Retrieved June 5, 2022, from Anadolu Agency website: <https://www.aa.com.tr/en/africa/morocco-israel-6-decades-of-secret-ties-cooperation/2083157#!>

Tharoor, I. (2020, December 14). Trump’s parting gift to Morocco. Retrieved June 6, 2022, from The Washington Post website: <https://www.washingtonpost.com/world/2020/12/14/trumps-parting-gift-morocco/>

Ulrichsen, K. C. (2016). *Israel and the Arab Gulf States: Drivers and Directions of Change*. Houston. Retrieved from <http://www.bakerinstitute.org/research/israel-and-arab-gulf-states-drivers-and-directions-change/>

US Embassy Rabat. (2022, December 22). Joint declaration. Retrieved June 3, 2022, from US Embassy and Consulates in Morocco website: <https://ma.usembassy.gov/joint-declaration/>

Zenko, M., & Lissner, R. (2017, January 13). Trump Is Going to Regret Not Having a Grand Strategy. Retrieved June 4, 2022, from foreignpolicy.com website: <https://foreignpolicy.com/2017/01/13/trump-is-going-to-regret-not-having-a-grand-strategy/>

Zoellick, R. (2017, August 22). The Conflict at the Heart of Donald Trump’s Foreign Policy. Retrieved June 4, 2022, from Financial Times website: <https://www.ft.com/content/896ff946-868e-11e7-8bb1-5ba57d47eff7>